

ABSTRAK

Zahra Maulidia: Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/Pn Srl Tentang Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam

Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl merupakan salah satu putusan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun, dalam praktiknya, hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; dan (2) mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah*, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-aql*), serta konsep jarimah takzir dalam hukum pidana Islam yang memberikan kewenangan kepada hakim atau *ulil amri* dalam menentukan sanksi sesuai dengan kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum, sedangkan data tersier berasal dari kamus hukum dan referensi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pasal, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari ancaman maksimal; (2) dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori jarimah takzir karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* dan pendekatan hukum pidana Islam melalui konsep takzir lebih menekankan aspek kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap akal manusia dibandingkan pendekatan hukum positif yang cenderung normatif dan terikat pada ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Narkotika, pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Takzir